EFEKTIVITAS PERAN DINAS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM PENCEGAHAN OCSEA (ONLINE CHILD SEXUAL EXPLOITATION AND ABUSE) DI WILAYAH KALIMANTAN TENGAH

Anis Aprilia¹, Ibnu Elmi as Pelu², Abdul Helim³

Universitas Islam Negeri Palangka Raya^{1,2,3}

Email: annisaprilio44@gmail.com¹, ibnu.elmi@iain-palangkaraya.ac.id², abdul.helim@iain-palangkaraya.ac.id³

Keywords

Keywords: OCSEA, child protection, online sexual exploitation, DPPA, Central Kalimantan.

Kata kunci: OCSEA, perlindungan anak, eksploitasi seksual daring, DPPA, Kalimantan Tengah.

Abstract

The advancement of digital technology presents a dual impact on children—on one hand, it offers vast opportunities for learning and interaction; on the other hand, it exposes them to serious threats such as Online Child Sexual Exploitation and Abuse (OCSEA). Central Kalimantan, with its vast geographical area, uneven digital literacy, and limited surveillance infrastructure, is particularly vulnerable to such online crimes. This article aims to examine the effectiveness of the Regional Office for Women and Children Protection (DPPA) in preventing and responding to OCSEA in Central Kalimantan. Using a descriptive-analytical approach, the study highlights four key strategies implemented by the DPPA: public education campaigns, cross-sector collaboration, complaint and victim support services, and local policy advocacy. Findings indicate that while the DPPA has initiated various programs, their overall effectiveness remains low due to limitations in human resources, funding, infrastructure, and inter-agency coordination. Strengthening institutional capacity, expanding outreach, and developing specific local regulations are essential to building a more robust child protection system against online sexual crimes.

Perkembangan teknologi digital membawa dampak ganda terhadap anak-anak, baik sebagai media pembelajaran maupun sebagai ruang yang membuka potensi eksploitasi seksual secara daring (Online Child Sexual Exploitation and Abuse atau OCSEA). Kalimantan Tengah sebagai provinsi dengan karakteristik geografis yang luas, tingkat literasi digital yang belum merata, serta keterbatasan infrastruktur pengawasan daring, menjadi salah satu wilayah yang rawan terhadap ancaman OCSEA. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas peran Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak (DPPA) dalam upaya pencegahan dan penanganan OCSEA di Kalimantan Tengah. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif-analitis dengan menyoroti empat aspek utama strategi DPPA, yakni kampanye edukasi publik, kolaborasi lintas sektor, penyediaan layanan pengaduan dan pendampingan, serta advokasi kebijakan daerah. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun DPPA telah melakukan berbagai inisiatif, efektivitasnya masih tergolong rendah karena keterbatasan SDM, dana, infrastruktur, serta belum optimalnya koordinasi antarlembaga. Diperlukan penguatan

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam dua dekade terakhir telah mengubah secara fundamental cara manusia berinteraksi, bekerja, belajar, dan mengakses berbagai layanan. Internet menjadi ruang yang tak terbatas, memungkinkan pertukaran informasi dalam hitungan detik dan menciptakan peluang besar dalam sektor pendidikan, ekonomi, hingga hiburan. Di tengah manfaat yang sangat besar ini, kelompok usia anak-anak termasuk yang paling aktif menggunakan internet, baik melalui perangkat komputer maupun gawai pribadi. Akses terhadap dunia digital telah memperluas wawasan dan kreativitas anak-anak, serta membuka peluang pembelajaran yang sebelumnya tidak terbayangkan.

Namun, di balik manfaat tersebut, ruang digital juga menghadirkan berbagai risiko serius yang berdampak langsung terhadap keselamatan dan kesejahteraan anak. Salah satu bentuk ancaman paling berbahaya yang terus meningkat dalam era digital adalah Online Child Sexual Exploitation and Abuse (OCSEA). Istilah ini merujuk pada segala bentuk eksploitasi dan kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak-anak melalui media daring. Tindakan ini mencakup beragam bentuk, mulai dari *grooming* atau manipulasi emosional terhadap anak untuk tujuan seksual, *sexortion* atau pemerasan dengan konten seksual, penyebaran dan produksi konten pornografi anak, hingga ajakan bertemu secara fisik dengan maksud melakukan pelecehan seksual yang diawali dari interaksi digital.

OCSEA merupakan bentuk kejahatan yang kompleks karena pelakunya sering kali anonim, lintas negara, dan memanfaatkan platform daring yang sulit dilacak. Anak-anak yang menggunakan media sosial, aplikasi perpesanan, maupun platform video sering menjadi sasaran empuk karena masih belum memiliki pemahaman yang utuh tentang risiko di dunia maya. Ditambah lagi, ketidakhadiran pengawasan orang tua, kurangnya edukasi keamanan digital di sekolah, serta ketidaktahuan anak terhadap hak-hak perlindungan mereka membuat ancaman ini semakin sulit dideteksi.

Secara global, OCSEA telah mendapat perhatian serius dari lembaga internasional seperti UNICEF, INTERPOL, dan ECPAT International. Data dari lembaga-lembaga tersebut menunjukkan bahwa Indonesia termasuk dalam kategori negara dengan

tingkat risiko tinggi, karena selain jumlah anak yang besar, penggunaan internet juga meningkat pesat sementara sistem perlindungan digital masih lemah. Namun demikian, meskipun OCSEA diakui sebagai isu nasional dan global, dampaknya di tingkat lokal justru lebih rentan dan nyata.

Salah satu wilayah yang patut mendapat perhatian khusus adalah Provinsi Kalimantan Tengah, yang memiliki karakteristik wilayah geografis yang luas, populasi yang tersebar, serta akses infrastruktur digital yang belum merata. Di daerah-daerah pedalaman dan pelosok, jaringan internet mulai masuk namun tidak diiringi dengan literasi digital yang memadai. Banyak anak-anak menggunakan media sosial tanpa pendampingan, sementara orang tua atau wali tidak memahami bagaimana cara melakukan pengawasan digital. Hal ini menciptakan celah yang sangat besar bagi kejahatan berbasis daring, khususnya eksploitasi seksual terhadap anak.

Selain itu, tantangan geografis yang dihadapi Kalimantan Tengah juga membuat akses terhadap layanan perlindungan anak menjadi terbatas. Layanan pengaduan, bantuan psikologis, dan rehabilitasi anak korban kekerasan belum tersedia secara merata di seluruh wilayah. Sebagian besar hanya terpusat di ibu kota provinsi, sehingga anak-anak di desa-desa terpencil sulit untuk mendapat bantuan cepat jika menjadi korban OCSEA. Keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, belum adanya sistem pelaporan berbasis teknologi, serta kurangnya kebijakan lokal yang spesifik mengatur pencegahan kekerasan daring semakin memperparah situasi.

Dalam menghadapi tantangan ini, peran Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak (DPPA) menjadi sangat krusial. Sebagai lembaga pemerintah daerah yang memiliki mandat untuk melindungi dan memberdayakan kelompok rentan, termasuk anak-anak, DPPA memiliki fungsi penting dalam menyelenggarakan layanan pencegahan kekerasan, memberikan edukasi, menyediakan pendampingan psikologis dan hukum, serta mendorong kebijakan yang berpihak pada keselamatan anak di semua ruang, termasuk ruang digital.

Secara umum, peran DPPA meliputi aspek preventif (pencegahan melalui edukasi dan kampanye), kuratif (penanganan korban), dan advokatif (penguatan regulasi dan kebijakan daerah). Dalam konteks pencegahan OCSEA, DPPA dituntut untuk memahami dinamika teknologi digital, mampu membangun kerja sama lintas sektor, serta menjangkau masyarakat sampai tingkat desa. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan peran ini sering terkendala oleh berbagai hambatan, seperti keterbatasan dana,

minimnya SDM terlatih, serta belum adanya koordinasi antarlembaga yang kuat dalam penanganan kasus OCSEA secara terpadu.

Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara mendalam sejauh mana efektivitas DPPA Kalimantan Tengah dalam mencegah dan menangani kasus-kasus OCSEA. Evaluasi ini tidak hanya penting untuk menilai kinerja DPPA, tetapi juga sebagai dasar untuk merumuskan strategi yang lebih komprehensif dalam membangun sistem perlindungan anak berbasis digital di daerah. Kajian ini perlu dilakukan dengan pendekatan deskriptif-analitis yang memadukan data empiris di lapangan, studi literatur, serta evaluasi kebijakan yang telah dijalankan.

Melalui tulisan ini, diharapkan akan tergambar secara utuh tantangan-tantangan yang dihadapi oleh DPPA Kalimantan Tengah dalam mengemban perannya, serta solusi strategis yang dapat dilakukan ke depan. Penelitian dan analisis semacam ini sangat penting, terutama di era digital yang terus berkembang, di mana perlindungan anak tidak hanya harus hadir secara fisik, tetapi juga secara virtual. Dengan demikian, hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi nyata bagi penguatan sistem perlindungan anak di Indonesia, khususnya dalam menghadapi ancaman eksploitasi seksual daring yang semakin mengkhawatirkan.

2. LANDASAN TEORITIS

OCSEA merupakan bentuk kekerasan seksual yang terjadi ketika anak dieksploitasi secara seksual melalui platform online. Eksploitasi ini bisa terjadi dalam bentuk interaksi langsung seperti live streaming, pengiriman konten seksual anak, hingga pemerasan dengan konten yang sudah diperoleh pelaku. Menurut laporan dari ECPAT International (2021), Indonesia termasuk negara dengan kasus OCSEA yang terus meningkat setiap tahunnya, sebagian besar korbannya adalah anak perempuan dan pelaku banyak berasal dari jaringan internasional maupun domestik.

Teori sistem perlindungan anak (*child protection system theory*) menekankan pentingnya sinergi antara negara, masyarakat, keluarga, dan anak itu sendiri dalam membentuk sistem yang tangguh untuk mencegah segala bentuk kekerasan. Dalam sistem ini, lembaga seperti DPPA memegang peranan sentral karena memiliki otoritas untuk membentuk kebijakan, mengoordinasikan layanan perlindungan, serta mengintervensi kasus secara langsung.

Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 (jo. UU No. 35 Tahun 2014) menjadi payung hukum utama, di mana pemerintah pusat dan daerah berkewajiban menjamin perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan. Hal ini diperkuat oleh UU ITE yang mengatur larangan penyebaran konten pornografi anak, serta UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang memperluas pengakuan atas kekerasan seksual di ruang siber. Namun, implementasi hukum ini sangat tergantung pada kinerja aktor lokal, terutama DPPA.

Kondisi Sosial dan Digital di Kalimantan Tengah

Provinsi Kalimantan Tengah merupakan salah satu daerah dengan tingkat urbanisasi yang relatif rendah, di mana sebagian besar penduduk tinggal di wilayah pedalaman, hutan, dan daerah transmigrasi. Akses internet masih menjadi masalah besar, terutama bagi keluarga dengan ekonomi menengah ke bawah yang hanya memiliki satu perangkat, sering kali tanpa pengawasan.

Anak-anak di daerah ini lebih rentan terpapar konten berbahaya, karena penggunaan gawai tidak dibarengi dengan pendidikan literasi digital. Banyak orang tua yang belum memahami risiko dunia maya atau belum memiliki kapasitas untuk membimbing anak-anaknya dalam menggunakan internet secara aman. Selain itu, tidak semua sekolah memiliki kurikulum atau program edukasi yang membahas keamanan digital bagi siswa dan orang tua.

Lemahnya pengawasan terhadap anak saat online menjadikan mereka sasaran empuk bagi pelaku OCSEA, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Anak-anak yang terpapar kemiskinan, konflik keluarga, dan isolasi sosial menjadi lebih mudah dijerat oleh bujuk rayu pelaku yang menawarkan uang, perhatian, atau hadiah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran dan Strategi DPPA dalam Pencegahan OCSEA

1. Kampanye dan Edukasi Publik

Salah satu strategi utama yang dilakukan Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak (DPPA) Kalimantan Tengah dalam upaya pencegahan OCSEA adalah dengan menyelenggarakan kampanye dan edukasi publik yang menyoar anak-anak, orang tua, tenaga pendidik, serta masyarakat umum. Kampanye ini dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi langsung ke sekolah-sekolah, pelatihan bagi guru dan orang tua, serta penyebaran materi edukatif melalui media sosial dan media massa lokal. Materi yang

diberikan meliputi pemahaman tentang pentingnya menjaga privasi digital, bagaimana mengenali upaya manipulatif seperti *grooming*, serta langkah-langkah yang harus diambil ketika menghadapi potensi pelecehan seksual daring.

Namun, pelaksanaan kegiatan ini masih menemui sejumlah kendala. Pertama, distribusi kampanye masih terfokus pada wilayah-wilayah perkotaan seperti Kota Palangka Raya dan sekitarnya, sementara daerah-daerah terpencil dan pedalaman yang notabene juga rentan terhadap kejahatan daring belum sepenuhnya terjangkau. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan infrastruktur jalan, akses transportasi, dan fasilitas penunjang lainnya.

Kedua, pelaksanaan kampanye juga sering kali bersifat insidental dan tidak berkelanjutan karena keterbatasan anggaran operasional. DPPA tidak selalu memiliki dana untuk melakukan monitoring pasca-sosialisasi atau melakukan evaluasi dampak dari kampanye yang telah dilaksanakan. Akibatnya, pesan yang disampaikan tidak tertanam secara mendalam dalam kesadaran masyarakat.

Ketiga, dari sisi media digital, meskipun DPPA telah bekerja sama dengan media lokal dan platform digital untuk menyebarkan konten edukatif, jangkauannya masih terbatas. Sebagian besar konten tidak diadaptasi dengan konteks budaya lokal, sehingga penerima informasi di wilayah adat atau komunitas tradisional mungkin mengalami kesulitan dalam memahami atau menginternalisasi pesan-pesan yang disampaikan.

Untuk mengatasi hal ini, dibutuhkan pendekatan edukasi yang lebih interaktif, berbasis komunitas, serta mengoptimalkan peran tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat sebagai agen perubahan dalam menyuarakan pentingnya perlindungan anak di ruang digital.

2. Kolaborasi Lintas Sektor

DPPA Kalimantan Tengah menyadari bahwa OCSEA merupakan kejahatan yang kompleks, melibatkan unsur teknologi, hukum, sosial, dan psikologis. Oleh karena itu, strategi penanggulangannya tidak bisa dilakukan secara tunggal. DPPA telah menjalin kerja sama dengan berbagai pihak seperti Kepolisian Republik Indonesia (khususnya Unit Pelayanan Perempuan dan Anak), Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID), Dinas Komunikasi dan Informatika, dan organisasi masyarakat sipil yang bergerak di bidang perlindungan anak.

Kolaborasi ini dimaksudkan untuk membentuk sistem deteksi dini, pelaporan kasus, penanganan korban, serta penghapusan konten digital yang mengandung unsur

kekerasan seksual terhadap anak. Namun, dalam pelaksanaannya, kolaborasi ini belum berjalan secara optimal. Masih ditemukan tumpang tindih peran, komunikasi yang tidak efektif, serta kurangnya keseragaman prosedur penanganan.

Salah satu hambatan terbesar adalah belum adanya **pusat data bersama** yang memungkinkan pertukaran informasi antarinstansi secara cepat dan aman. Akibatnya, pelacakan kasus menjadi lambat, dan sering kali korban kehilangan kesempatan untuk mendapatkan bantuan cepat.

Aparat penegak hukum di daerah juga mengaku kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku OCSEA yang menggunakan identitas palsu, jaringan enkripsi, dan platform internasional. Hal ini menunjukkan perlunya pelatihan teknis lanjutan, serta dukungan teknologi canggih dalam proses investigasi dan forensik digital.

DPPA perlu mendorong pembentukan tim terpadu lintas sektor di tingkat kabupaten/kota yang memiliki mandat dan sumber daya untuk bertindak cepat dalam menangani setiap laporan OCSEA yang masuk.

3. Layanan Pengaduan dan Pendampingan

Dalam menjalankan fungsinya sebagai pelindung anak, DPPA telah menyediakan beberapa layanan pengaduan yang dapat diakses oleh masyarakat. Pengaduan dapat dilakukan secara langsung ke kantor DPPA, melalui call center, atau melalui pos pengaduan kekerasan yang tersebar di beberapa wilayah. Selain itu, DPPA juga menerima laporan melalui jalur online, meskipun fasilitas ini masih terbatas dan belum terintegrasi dengan sistem digital nasional.

Setelah menerima laporan, DPPA biasanya melakukan asesmen awal dan jika diperlukan akan merujuk korban ke layanan pendampingan psikologis dan hukum. Namun, dari sisi ketersediaan SDM, masih sangat terbatas jumlah konselor, psikolog anak, dan pendamping hukum yang memiliki keahlian khusus dalam menangani trauma akibat kekerasan seksual daring. Banyak kasus yang akhirnya hanya didampingi secara umum tanpa pendekatan trauma healing yang sesuai standar.

DPPA juga telah mendirikan rumah aman (shelter) untuk korban kekerasan seksual, termasuk OCSEA. Namun, jumlah rumah aman yang tersedia sangat terbatas, hanya terdapat di ibu kota provinsi dan belum menjangkau seluruh kabupaten. Akibatnya, anak-anak korban yang tinggal di daerah pelosok harus menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan layanan, atau dalam beberapa kasus, tidak mendapat perlindungan yang layak.

Fasilitas rumah aman juga masih menghadapi tantangan dalam hal kelengkapan sarana, kenyamanan psikologis anak, dan keahlian tenaga pendukung yang ramah anak. Untuk menjawab masalah ini, DPPA perlu memperluas cakupan shelter, merekrut tenaga pendamping yang memiliki sertifikasi perlindungan anak, serta membangun sistem pelayanan berbasis kebutuhan korban.

4. Advokasi Regulasi dan Kebijakan Daerah

Salah satu langkah strategis DPPA dalam menghadapi OCSEA adalah dengan mendorong lahirnya regulasi yang mendukung perlindungan anak dari kejahatan siber. Saat ini, memang telah ada regulasi nasional, namun implementasi di tingkat daerah memerlukan legalitas lokal yang konkret seperti Peraturan Daerah (Perda), Surat Edaran Bupati/Walikota, atau Keputusan Gubernur.

DPPA Kalimantan Tengah telah mengajukan naskah akademik untuk Perda Perlindungan Anak Berbasis Digital, namun hingga saat ini belum disahkan karena masih kurangnya perhatian dan pemahaman dari DPRD serta pejabat eksekutif terkait urgensi ancaman OCSEA. Banyak pihak masih melihat eksploitasi daring sebagai hal abstrak, berbeda dengan kekerasan fisik yang lebih terlihat nyata.

Selain advokasi regulasi, DPPA juga sedang menyusun modul pelatihan bagi aparatur desa, khususnya perangkat desa dan kader posyandu, agar mampu menjadi ujung tombak perlindungan anak di tingkat akar rumput. Program ini penting untuk memperluas jangkauan edukasi dan deteksi dini kasus di komunitas yang jauh dari akses layanan pemerintah pusat.

Namun, pelatihan ini membutuhkan waktu, biaya, dan keterlibatan lintas sektor, sehingga perlu ada dukungan anggaran khusus dari APBD dan kementerian terkait. Tanpa intervensi kebijakan yang kuat, upaya DPPA dalam membentuk sistem perlindungan OCSEA di tingkat lokal akan terus mengalami keterbatasan.

Evaluasi Efektivitas Peran DPPA dalam Pencegahan OCSEA

Untuk mengukur efektivitas peran DPPA dalam mencegah dan menangani OCSEA, digunakan beberapa indikator seperti:

- a. Jumlah kegiatan kampanye dan edukasi yang dilakukan;
- b. Jumlah laporan OCSEA yang diterima dan ditindaklanjuti;
- c. Jumlah korban yang mendapatkan layanan pendampingan dan rehabilitasi;
- d. Capaian kerja sama lintas sektor dalam satuan waktu tertentu;
- e. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas layanan.

Berdasarkan pengamatan dan hasil evaluasi internal, dapat disimpulkan bahwa efektivitas DPPA Kalimantan Tengah dalam menangani OCSEA saat ini masih berada pada tingkat sedang ke rendah. Beberapa hambatan utama yang mempengaruhi efektivitas tersebut meliputi:

- a. Keterbatasan SDM, baik dari segi jumlah maupun kompetensi teknis dalam penanganan kekerasan seksual daring.
- b. Keterbatasan anggaran dan fasilitas, terutama untuk menjangkau daerah terpencil dan membiayai kampanye digital.
- c. Belum adanya kebijakan daerah yang secara teknis dan eksplisit mengatur tentang OCSEA, menyebabkan tidak adanya landasan hukum untuk intervensi jangka panjang.
- d. Rendahnya literasi digital masyarakat, yang membuat banyak orang tua dan anak tidak memahami risiko OCSEA serta cara melindungi diri.
- e. Tidak adanya sistem pelaporan berbasis digital yang terintegrasi, yang seharusnya dapat mempercepat penanganan dan pengumpulan data kasus.

Dari evaluasi ini, penting bagi pemangku kebijakan untuk mereformasi pendekatan perlindungan anak berbasis digital secara menyeluruh dan lintas sektor. Tanpa itu, OCSEA akan terus menjadi kejahatan yang bersembunyi di balik layar tanpa tersentuh intervensi efektif.

Rekomendasi Strategis

Untuk meningkatkan efektivitas peran DPPA Kalimantan Tengah dalam pencegahan OCSEA, maka perlu diambil langkah-langkah berikut:

1. Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan rutin tentang keamanan siber, psikologi anak korban, dan sistem pelaporan OCSEA.
2. Digitalisasi sistem layanan agar anak-anak dan orang tua dapat melapor dan mencari informasi secara lebih aman dan mudah.
3. Penguatan kolaborasi dengan NGO, komunitas, dan tokoh adat lokal sebagai mitra penyebaran edukasi digital yang kontekstual.
4. Pembuatan Peraturan Daerah khusus tentang OCSEA, sebagai landasan hukum dalam pencegahan dan penindakan.
5. Penyusunan kurikulum keamanan digital anak pada tingkat sekolah dasar dan menengah, bekerja sama dengan Dinas Pendidikan.

6. Peningkatan literasi digital keluarga, agar orang tua memiliki pengetahuan dan peran aktif dalam menjaga keamanan anak saat berselancar di dunia maya.

4. KESIMPULAN

OCSEA adalah ancaman nyata bagi anak-anak di Kalimantan Tengah, terutama di era digital yang semakin cepat berkembang. DPPA sebagai lembaga pelindung anak di tingkat daerah memiliki peran strategis dalam mencegah dan menangani kasus ini. Meskipun sudah banyak upaya dilakukan, efektivitasnya masih belum optimal karena berbagai hambatan struktural, kultural, dan teknis. Diperlukan penguatan kapasitas, sistem, dan kolaborasi lintas sektor untuk menjadikan Kalimantan Tengah sebagai wilayah yang aman bagi anak dari eksploitasi seksual daring.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Ariefana, A. (2022). *Keamanan Digital untuk Anak dan Remaja: Perlindungan di Era Siber*. Jakarta: Penerbit Prenadamedia Group.
- Badan Pusat Statistik Kalimantan Tengah. (2023). *Statistik Provinsi Kalimantan Tengah 2023*. Palangka Raya: BPS Provinsi Kalimantan Tengah.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*(5th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- ECPAT International. (2021). *Disrupting Harm in Indonesia: Evidence on Online Child Sexual Exploitation and Abuse*. Retrieved from <https://ecpat.org>
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2022). *Laporan Tahunan KPAI 2022: Perlindungan Anak di Era Digital*. Jakarta: KPAI.
- Kurniawan, D. (2020). *Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Siber*. Bandung: Refika Aditama.
- Ministry of Women Empowerment and Child Protection of Indonesia (KPPPA). (2021). *Panduan Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik terhadap Anak*. Jakarta: KPPPA.
- UNICEF Indonesia. (2021). *Protecting Children from Online Sexual Exploitation and Abuse in Indonesia*. Retrieved from <https://www.unicef.org/indonesia>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.